



**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
( L K j I P )  
TAHUN 2023**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SUMENEP  
2024**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep. Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

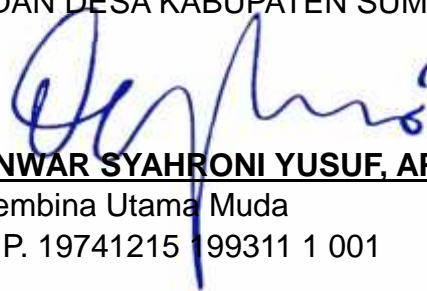
Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah

Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sumenep,

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN SUMENEP



**ANWAR SYAHRONI YUSUF, AP., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19741215 199311 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi Anggaran	56
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	60
BAB IV PENUTUP	64

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan

dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. perumusan dan penetapan pedoman, regulasi, standar, prosedur dan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. pelaksanaan program dan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

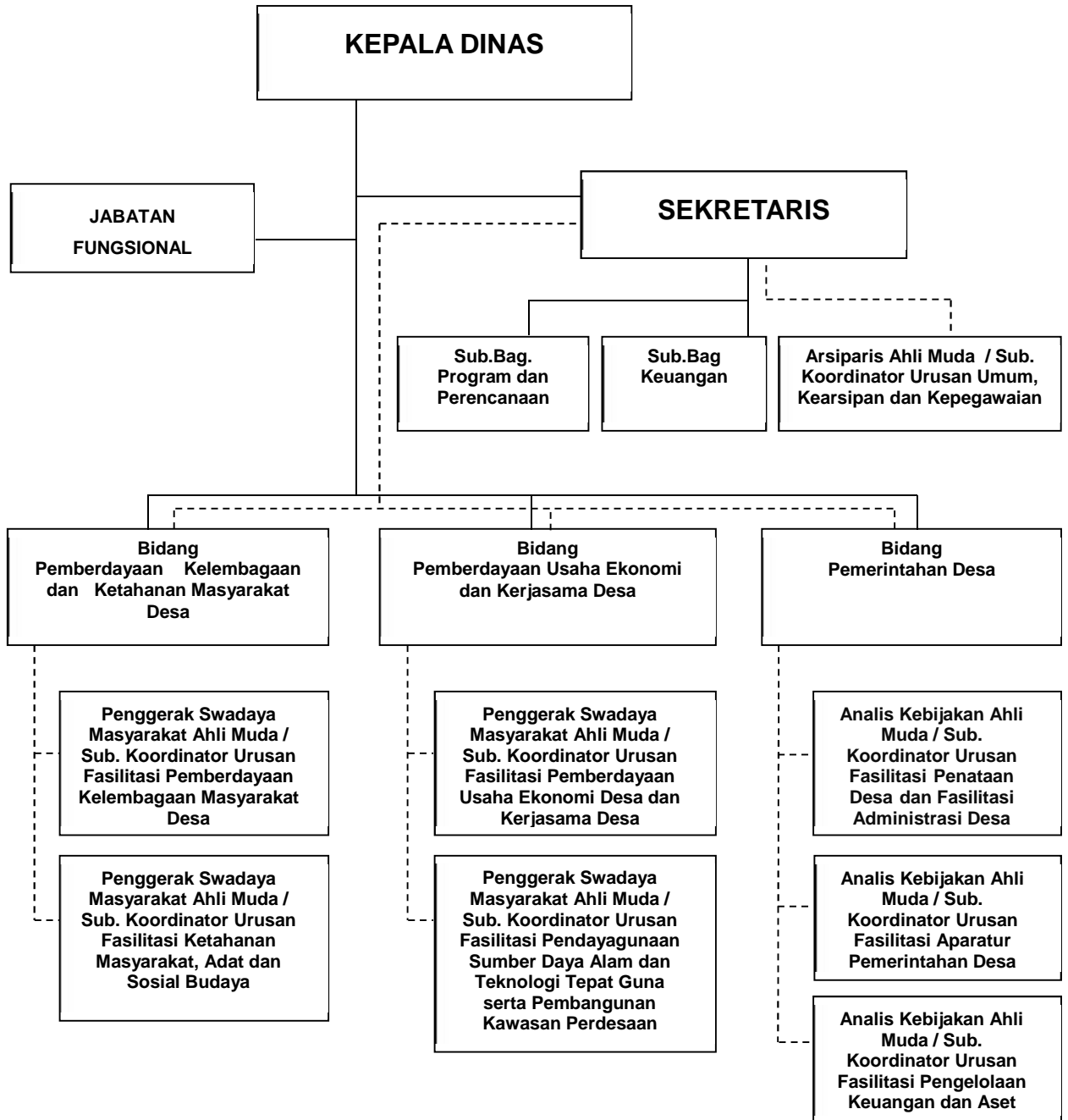
4. pelaksanaan pengoordinasian dengan instansi terkait penyusunan program, pembinaan dan bimbingan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
6. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Program dan Perencanaan; dan
  2. Sub Bagian Keuangan.
  3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketahanan Masyarakat Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep.

**Gambar 1.1.**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMENEP**





### **C. Isu Strategis Perangkat Daerah**

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Rendahnya aksesibilitas dan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola sumber daya dan aktifitas perekonomian
2. Rendahnya tingkat Pemahaman dan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya peningkatan status desa dari desa berkembang ke desa maju;
2. Minimnya keberdayaan masyarakat pedesaan;
3. Tidak berfungsinya secara optimal unit usaha di wilayah pedesaan;
4. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
5. Kurang profesionalnya pengelolaan sistem pemerintahan desa;
6. Masih perlunya peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam membangun desa;
7. Rendahnya SDM pengelola keuangan desa;
8. Belum akuntabel, transparan dan partisipatifnya pengelolaan keuangan desa.

#### **D. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

#### **E. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah :

**BAB I           PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematis.

**BAB II           PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.

**BAB III          AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

**BAB IV          PENUTUP**

**A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan sasaran atas tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

**VISI :**

**“Sumenep Unggul, Mandiri Dan Sejahtera”**

**MISI :**

- Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan.
- Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir.
- Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.
- Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal.
- Misi 5 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep berdasarkan tugas dan fungsi

mengacu kepada RPJMD yaitu Misi ke 2, dan 3 dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang diintervensi sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.1**

**Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Yang Diintervensi**

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep**

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan dari Hulu Ke Hilir	Meningkatkan Derajat dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Pendapatan Perkapita	Pendapatan Perkapita (Juta/Orang/Tahun)
2	Meningkatkan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif	meningkatnya layanan public yang inovatif berbasis e-government	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra, indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

**1. Tujuan dan Sasaran Renstra**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari

tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran RPJMD yang diinterfensi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep**  
**Kabupaten/Kota**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Desa	-	Jumlah desa berkembang yang menjadi desa maju	7	7	7	7	7	7
	Mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Desa yang Mandiri dan Produktif	% BUMDES /BUMDESMA yang memberikan kontribusi pada PADes	3,64	4,24	4,85	5,45	6,06	6,67
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	% Desa yang melaksanakan Tata Kelola dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep periode 2021-2026

## 2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Kabupaten Sumenep tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Desa yang Mandiri dan Produktif	Persentase BUMDES /BUMDESMA yang memberikan kontribusi pada PADes	Persentase	Merupakan Penilaian terhadap BUMDes+BUMD ESMA yang aktif yang sudah memberikan kotribusi pada Pendapatan Asli Desa (PADes)	$\frac{\sum \text{Desa yang melaksanakan Tata Kelola dengan Baik}}{\sum \text{Desa}} \times 100\%$	DPMD
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Persentase Desa yang melaksanakan Tata Kelola dengan baik	Persentase	Merupakan Penilaian terhadap Desa dalam hal Tatakelola Pemerintahan dengan baik	$\frac{\sum \text{BUMDES+BUMDESMA yang memberikan Kontribusi PADes}}{\sum \text{BUMDES+BUMDESMA seluruh}} \times 100\%$	DPMD
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	Merupakan Penilaian terhadap Capain Kinerja Perangkat Daerah	Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat	Inspektorat

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2023

## B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2023 :

**Tabel 2.4**  
**Rencana Kerja Tahun 2023**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten**  
**Sumenep Kabupaten Sumenep**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Desa			Jumlah desa berkembang yang menjadi desa maju	Desa	7
		1.1	Mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Desa yang Mandiri dan Produktif	Persentase BUMDES /BUMDESMA yang memberikan kontribusi pada PADes	%	4,85
		1.2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Persentase Desa yang melaksanakan Tata Kelola dengan baik	%	100
		1.3	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100

Sumber : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Kabupaten Sumenep tahun 2023



### **C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 25 Januari 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 20 bulan November tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan perubahan alokasi anggaran dan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran). Berikut perjanjian kinerja setelah dan sebelum perubahan :

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Sumenep Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Desa yang Mandiri dan Produktif	Persentase BUMDES /BUMDESMA yang memberikan kontribusi pada PADes	4,85 %	4,85 %
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Persentase Desa yang melaksanakan Tata Kelola dengan baik	100%	100%
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep :

**Tabel 2.6**  
**Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten**  
**Sumenep Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023**

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Anggaran	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100	100	5.252.103.681	6.498.898.884

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Anggaran	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100	100	3.450.000	3.450.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian laporan kinerja OPD tepat waktu	100	100	4.235.825.918	5.411.309.171
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas ASN	0,25	0,25	37.200.000	36.973.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan yang dipenuhi	100	100	613.440.060	434.012.060
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis barang milik daerah yang diadakan	6	6	37.862.500	64.130.500
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa layanan yang dipenuhi	100	100	145.298.000	145.298.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100	100	179.027.203	403.726.153
II.	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase BUMDes Maju	6,36	6,36	696.945.900	726.945.900
		Persentase Desa yang melakukan Kerjasama	33,33	33,33		
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah BUMDes berkembang menjadi maju	21	21	696.945.900	726.945.900
		Jumlah BUMDes Bersama yang terbentuk	28	28		
III.	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang difasilitasi dalam penataan Desa	12,77	12,77	15.001.000	15.001.000
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penataan Desa	295	295	15.001.000	15.001.000

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Anggaran	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
IV.	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa yang melaksanakan tertib administrasi</b>	<b>50,87</b>	<b>50,87</b>	<b>5.286.042.060</b>	<b>7.833.542.060</b>
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Administrasi Desa	330	330	5.286.042.060	7.833.542.060
V	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase Lembaga Adat Desa yang terbentuk</b>	<b>5,39</b>	<b>5,39</b>	<b>3.708.845.694</b>	<b>3.436.845.694</b>
		<b>Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif</b>	<b>61,53</b>	<b>61,53</b>		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat Desa terbentuk berdasarkan Per UU	18	18	3.708.845.694	3.436.845.694
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terbentuk berdasarkan Per UU	5373	5373		
<b>Jumlah Anggaran</b>					<b>14.958.938.335</b>	<b>18.511.233.538</b>

Sumber : DPA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023

#### D. Pohon Kinerja Tahun 2023

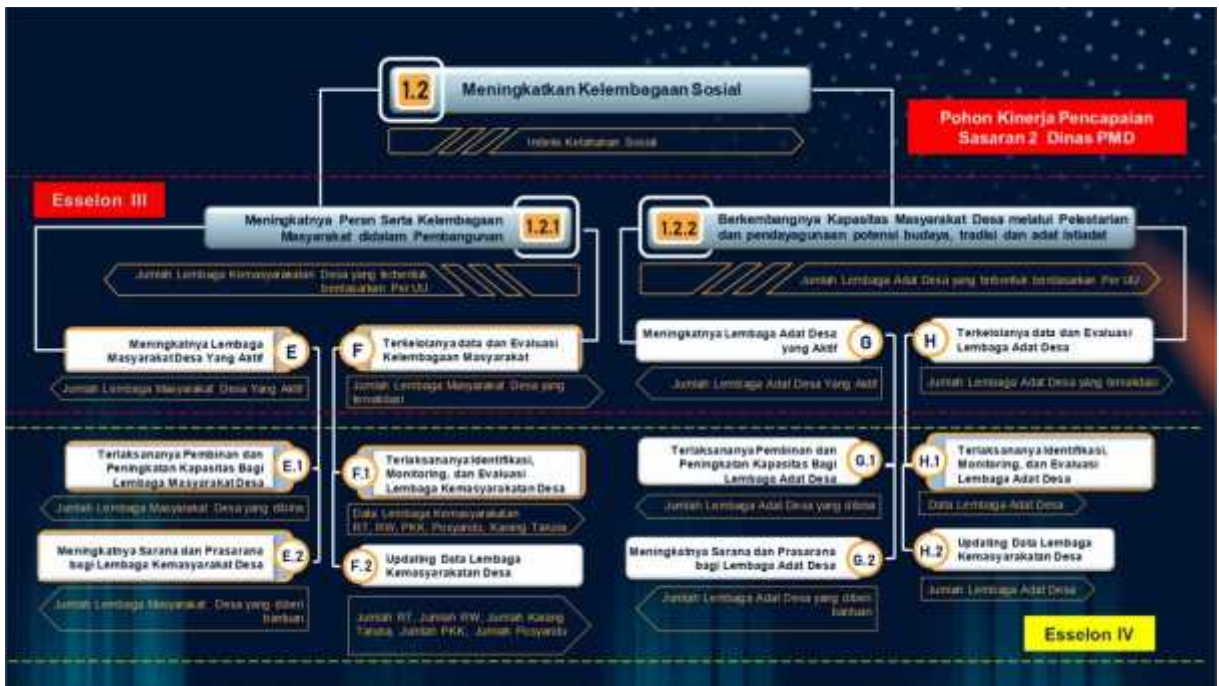
Pohon Kinerja yang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep dalam mencapai Indikator Kinerja Utama, rencana kerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas. Pohon kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :



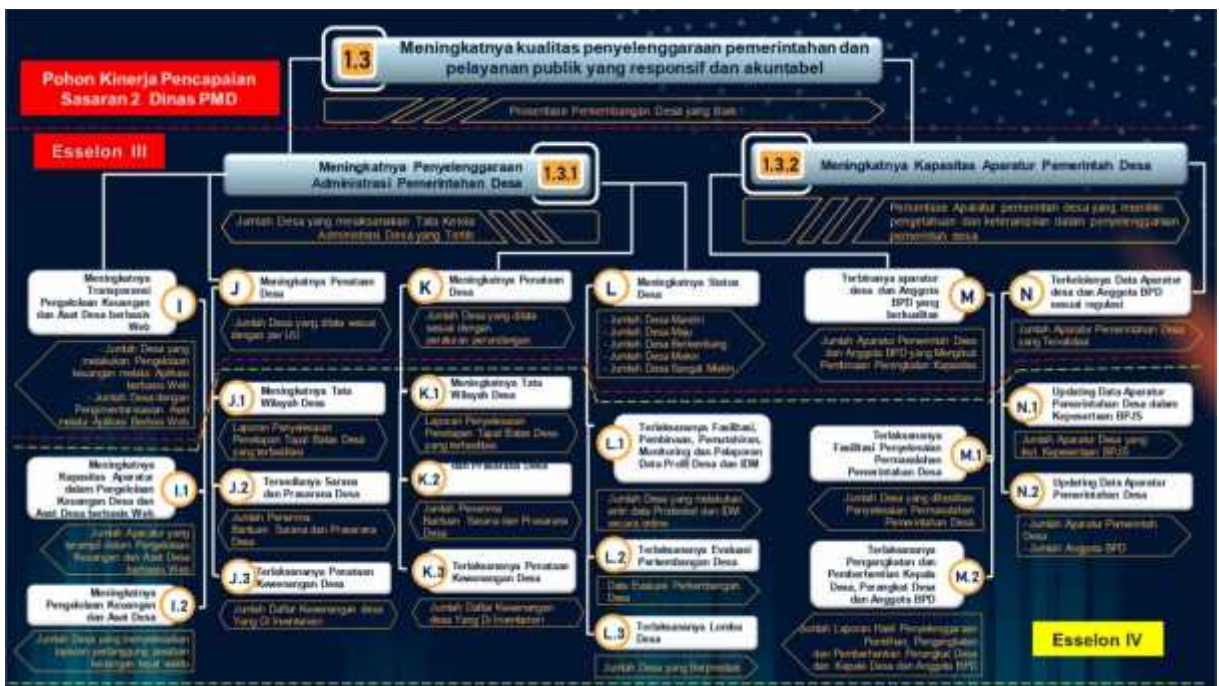
Gambar 1. Pohon Kinerja Pencapaian Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Gambar 2. Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Gambar 3. Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Gambar 4. Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengemban amanah Masyarakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diintervensi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 100
2	Tinggi	76 90
3	Sedang	66 75
4	Rendah	51 65
5	Sangat Rendah	50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep.



## A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

### a) Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep**  
**Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Desa yang Mandiri dan Produktif	Persentase BUMDES /BUMDESMA yang memberikan kontribusi pada PADes	4,85 %	25,64	528,68	Sangat Tinggi	DPMD Kab. Sumenep
2	Meningkatnya kualitas penyelenggara	Persentase Desa yang melaksanakan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	DPMD Kab.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
	aan pemerintahan desa dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Tata Kelola dengan baik					Sumenep
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	81,45%	81,45%	Tinggi	DPMD Kab. Sumenep

## Sasaran Strategis

### 1) Mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Desa yang Mandiri dan Produktif dengan indikator Persentase BUMDES /BUMDESMA yang memberikan kontribusi pada PADes.

Sumber daya desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan modal pembangunan yang harus dioptimalkan pemanfaatannya sehingga memunculkan potensi desa yang bisa dikembangkan sesuai dengan karakter lokal (lokal genius) dengan tidak meninggalkan kelestarian lingkungan sebagai penopang hajat hidup masyarakat, upaya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam masih memiliki keterbatasan pengelolaaannya, hal ini disebabkan sumber daya manusia masih memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan. Karena itulah diperlukan stimulasi dan transpormasi ilmu pengetahuan dan teknologi terapan yang dapat memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam, potensi dan lingkungan hidup desa guna menopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraannya.

Salah satu aspek utama dalam meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dalam aspek ketahanan ekonomi adalah pengembangan potensi ekonomi lokal. Dengan membentuk

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan BUMDESMA (Badan Usaha Milik Desa Bersama).

Hal ini dapat diketahui dari data yang ada bahwa pada tahun 2023 Jumlah BUMDes yang terbentuk sebanyak 328 Bumdes, 90 BUMDes kategori Sehat, 138 BUMDes kategori Aktif, 100 BUMDes kategori Tidak Aktif Sedangkan untuk BUMDESMA yang terbentuk pada Tahun 2023 sebanyak 23 BUMDESMA (258 Desa), 20 BUMDESMA (251 Desa) merupakan Hasil Perubahan / Transformasi Pengelolaan UPK Eks. PNPM menjadi BUMDesma sedangkan 3 BUMDESMA (7 Desa) terbentuk berdasarkan Kawasan (BUMDESMA Kawasan)

Sejalan dengan indikator sasaran Persentase BUMDES /BUMDESMA yang memberikan kontribusi pada PADes maka, pada 2023 Jumlah BUMDes yang terbentuk sebanyak 328 Bumdes akan tetapi yang sehat sebanyak 90 BUMDes. Untuk BUMDESMA yang terbentuk pada Tahun 2023 sebanyak 23 BUMDESMA (258 Desa), 20 BUMDESMA merupakan Hasil Perubahan / Transformasi Pengelolaan UPK Eks. PNPM menjadi BUMDesma sedangkan 3 BUMDESMA terbentuk berdasarkan Kawasan (BUMDESMA Kawasan).

Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2023 terdapat sebanyak 90 BUMDes yang memberikan kontribusi pada PADes sedangkan BUMDes Ma pada tahun 2023 masih belum memberikan kontribusi pada PADes. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 BUMDes yang memberikan kontribusi PADes sebanyak 4,24% dengan realisasi sebesar 25,64% (90 BUMDes) maka capaian yang diperoleh sebesar 528,68% atau termasuk kategori sangat tinggi. Keberhasilan ini dicapai dikarenakan, adanya tingkat perkembangan BUMDes yang pesat dalam artian BUMDes banyak memberikan kontribusi pada desa berupa PADes.

Berikut disajikan Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Data Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes Ma) Tahun 2023 di Kabupaten Sumenep.

**Tabel 3.3**  
**Rekapitulasi Data BUMDes Tahun 2023**

No.	Kecamatan / Desa	Hasil MONITORING					Nama BUMDes	PADes	Ket.
		Terbentuk	Belum terbentuk	Aktif	Tidak aktif	Sehat	Sesudah Pendaftaran	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>KOTA SUMENEP</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>			
1.	KOLOR	1	-	1	-	-	Kurma Ajwa		
2.	PABIAN	1	-	1	-	-	Pabian Bersatu		
3.	MARENGAN DAYA	1	-	1	-	-	Semaru		
4.	KACONGAN	1	-		-	1	Kacongan Bersatu	317.000	
5.	PABERASAN	1	-	-	1	-	Kuda Putih		
6.	PARSANGA	1	-		-	1	Camar	4.269.651	
7.	BANGKAL	1	-	1	-	-	Berkarya		
8.	KEBUNAN	1	-	1	-	-	Mawar		
9.	PAMOLOKAN	1	-	-	1	-			
10.	PANGARANGAN	1	-	-	1	-	Kejora		
11.	PANDIAN	1	-	-	1	-	Tambak Keraton		
12.	KEBUNAGUNG	1	-	1	-	-	Goa Jeruk		
<b>2.</b>	<b>KALIANGET</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			
1.	PINGGIRPAPAS	1	-	-	1	-			
2.	KARANGANYAR	1	-	-	-	1		10.000.000	
3.	MARENGAN LAOK	1	-	1	-	-	Permata		
4.	KARTASADA	1	-	1	-	-			
5.	KALIMOOK	1	-	1	-	-			
6.	KALIANGET BARAT	1	-	1	-	-			
7.	KALIANGET TIMUR	1		-	1	-	Lestari		
<b>3.</b>	<b>MANDING</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>0</b>			
1.	KASENGAN	1	-	1	-	-			
2.	LALANGON	1	-	-	1	-	Putri Mandiri		
3.	TENONAN	1	-	-	1	-			
4.	LANJUK	1	-	-	1	-			
5.	GADDING	1	-	-	1	-			

No.	Kecamatan / Desa	Hasil MONITORING					Nama BUMDes	PADes	Ket.
		Terbentuk	Belum terbentuk	Aktif	Tidak aktif	Sehat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	GIRING	1	-	-	1	-			
7.	GUNUNG KEMBAR	1	-	1	-	-			
8.	JABA'AN	1	-	1	-	-			
9.	MANDING LAOK	1	-	-	1	-	Putra Harapan		
10.	MANDING TIMUR	1	-	-	1	-	Makmur Jaya		
11.	MANDING DAYA	1	-	-	1	-	Mitra Usaha Jaya		
<b>4.</b>	<b>TALANGO</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>			
1.	TALANGO	1		1	-	-	Makmur Jaya		
2.	PADIKE	1	-	-		1	Sumber Atom	2.000.000	
3.	CABBIYA	1	-	-	1	-	Cabbiya Bangkit		
4.	ESSANG	1	-	-	1	-	Essang Bersatu		
5.	KOMBANG	1	-	-	1	-	Siwalan		
6.	POTERAN	1	-	1	-	-	Ar-Rizqi		
7.	PALASA	1	-	-	1	-	Putra Palasa		
8.	GAPURANA	1	-	1	-	-	Gapurana Jaya		
<b>5.</b>	<b>BLUTO</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>12</b>			
1.	GULUK MANJUNG	1	-	-	-	1	Bintang Kejora	5.000.000	
2.	KAPEDI	1	-	1	-	-	Jaya Putra		
3.	PAKANDANGAN BARAT	1	-	-	-	1	Makmur Bersama	6.500.000	
4.	PAKANDANGAN TENGAH	1	-	-	-	1	Bina Sejahtera	1.500.000	
5.	PAKANDANGAN SANGRA	1	-	1	-		Bunga Indah		
6.	AENG DAKE	1	-	-	-	1	Makmur Jaya	8.000.000	
7.	AENG BAJA KENEK	1	-	1	-	-	Bintang Surya		
8.	BLUTO	1	-	1	-	-	Bhakti Andalan		
9.	LOBUK	1	-	-	-	1	Pelangi Nusantara	30.000.000	
10.	BUMBUNGAN	1	-	-	-	1	Barokah Bumbungan	2.400.000	
11.	MASARAN	1	-	-	-	1	Barokah	3.182.000	
12.	PALONGAN	1	-	-		1	Amangkurat	3.000.000	
13.	AENG BAJA RAJA	1	-	1	-		Makmur Jaya ABR		
14.	KARANG CAMPAKA	1	-		-	1	Matahari Cempaka	3.500.000	
15.	SERA BARAT	1	-	-	1	-	Putra Desa		
16.	SERA TENGAH	1	-	-	-	1		2.000.000	

No.	Kecamatan / Desa	Hasil MONITORING					Nama BUMDes	PADes	Ket.
		Terbentuk	Belum terbentuk	Aktif	Tidak aktif	Sehat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	SERA TIMUR	1	-	-	1	-			
18.	GINGGING	1	-	1	-		Pelita Muda		
19.	ERRABU	1	-	-	-	1	Sumber Surya	600.000	
20.	GILANG	1	-	-	-	1	Gilang Gemilang	1.500.000	
<b>6.</b>	<b>SARONGGII</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>			
1.	PAGAR BATU	1	-	-	-	1	Harapan bahari	14.720.000	
2.	TANJUNG	1	-		-	1	Permata Sari	3.800.000	
3.	KEBUNDADAP TIMUR	1	-		-	1	Pasopati	10.000.000	
4.	LANGSAR	1	-	-	1	-	Jaya Berkah		
5.	KEBUNDADAP BARAT	1	-	1	-	-	Ratu		
6.	SAROKA	1	-	-	1	-	sekar sari		
7.	TANAHMERAH	1	-	1	-	-	Rampak Naong		
8.	NAMBAKOR	1	-	1	-	-	Gajah Mada		
9.	SARONGGI	1	-	1	-	-	Kermata		
10.	MUANGAN	1	-	1	-	-	Graha Artha Mandiri		
11.	JULUK	1	-	-	1	-	Anugerah Jaya		
12.	AENGTONGTONG	1	-	1	-	-	Arya Pusaka		
13.	TALANG	1	-	-	1		Naga Merah		
14.	KAMBINGAN TIMUR	1	-	-	1	-	Sejuta Dinar		
<b>7.</b>	<b>LENTENG</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>2</b>			
1.	MONCEK BARAT	1	-	1	-	-	MUTIARA INDAH		
2.	MONCEK TENGAH	1	-	1	-	-	MANDIRI		
3.	MONCEK TIMUR	1	-	1	-	-	SERA' BERKAT		
4.	BANARESEP TIMUR	1	-	1	-	-	KURNIA BANTIM		
5.	TAROGAN	1	-	1	-		BINTANG HARAPAN		
6.	KAMBINGAN BARAT	1	-		-	1	MAHKOTA KAMBAR	2.500.000	
7.	POREH	1	-	1	-	-	MURAH REJEKI		
8.	LENTENG TIMUR	1	-	1	-	-	HARUM		
9.	LEMBUNG TIMUR	1	-	1	-	-	AMANAHAH		
10.	LENTENG BARAT	1	-	-	-	1	RODINDA	8.950.600	
11.	BANARESEP BARAT	1	-	1	-	-	Mawar		

No.	Kecamatan / Desa	Hasil MONITORING					Nama BUMDes	PADes	Ket.
		Terbentuk	Belum terbentuk	Aktif	Tidak aktif	Sehat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	BILLAPORA REBBA	1	-	1	-	-	Cahaya Bilepora Rebbe		
13.	LEMBUNG BARAT	1	-	1	-	-	NURUL IKHSAN TRANGGANO		
14.	ELLAK LAOK	1	-	1	-	-	INSAN BAROKAH		
15.	ELLAK DAYA	1	-	-	1	-	AS SALAM ELLAK DAYA		
16.	DARAMISTA	1	-	-	1	-	MELATI		
17.	JAMBU	1	-	-	1	-	JAMBU SATU		
18.	CANGKRENG	1	-	-	1	-	CANGKRENG		
19.	MEDDELAN	1	-	-	1	-	MEDDELEN BAROKAH		
20.	SENDIR	1	-	1	-	-	SUMBER REJEKI		
<b>8.</b>	<b>GILIGENTING</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			
1.	GALIS	1	-	-	-	1	Makmur Galis	1.500.000	
2.	GEDUGAN	1	-	-	-	1	Mawar Merah	500.000	
3.	BRINGSANG	1	-	-	-	1	Serunai Jingga	7.200.000	
4.	AENGANYAR	1	-	1	-	-			
5.	LOMBANG	1	-	-	1	-	Cahaya Lombang		
6.	JATE	1	-	1	-	-	Sejati		
7.	BANBARU	1	-	-	-	1	SUMBER REJEKI	1.500.000	
8.	BANMALENG	1	-	-	-	1	Sumber Sejahtera	350.000	
<b>9.</b>	<b>GULUK-GULUK</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>			
1.	BAKEONG	1	-	-	-	1	Mandiri Bakeong	5.000.000	
2.	PAYUDAN DUNDANG	1	-	-	1	-	SINGHO JUDHO		
3.	PORDAPOR	1	-	1	-	-	Idaman		
4.	GULUK-GULUK	1	-	-	1	-	Maju Bersama		
5.	KETAWANG LAOK	1	-	1	-	-	Maju Jaya		
6.	PANANGGUNGAN	1	-	1	-	-	Putri Kencana		
7.	BRAGUNG	1	-	-	1	-	Srikandi		
8.	TAMBUKO	1	-	1	-	-	Makmur Sejahtera		
9.	PAYUDAN NANGGER	1	-	-	-	1	Jebhu	4.150.000	
10.	PAYUDAN DALEMAN	1	-	-	1	-	Putrikuning		
11.	PAYUDAN KARANGSOKON	1	-	1	-	-	ABDI NUSA PAYUDAN		
12.	BATUAMPAR	1	-	1	-	-			

No.	Kecamatan / Desa	Hasil MONITORING					Nama BUMDes	PADes	Ket.
		Terbentuk	Belum terbentuk	Aktif	Tidak aktif	Sehat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10.</b>	<b>GANDING</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>8</b>			
1.	BATAAL BARAT	1	-	-	-	1	SUMBER EMPAT	600.000	
2.	BATAAL TIMUR	1	-	-	-	1	SUMBER MAKMUR	1.200.000	
3.	ROMBIYA BARAT	1	-	1	-		KENCANA		
4.	ROMBIYA TIMUR	1	-	-	-	1	PURNAMA	500.000	
5.	TALAGA	1	-		-	1	BERKAH	592.000	
6.	BILLAPORA BARAT	1	-	-	-	1	JHUNG ROJHUNG	250.000	
7.	BILLAPORA TIMUR	1	-	-	1	-			
8.	GANDING	1	-	1	-	-	WANGI		
9.	GADU TIMUR	1	-	1	-		SUMBER ANYAR		
10.	GADU BARAT	1	-	-	-	1	CAHAYA ABADI	1.000.000	
11.	KETAWANG LARANGAN	1	-	-	-	1	HARAPAN JAYA	1.108.000	
12.	KETAWANG PAREBAAN	1	-	1	-				
13.	KETAWANG DALEMAN	1	-	-	1	-			
14.	KETAWANG KARAY	1	-	-		1	BHAKTI IBU	300.000	
<b>11.</b>	<b>PRAGAAN</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>4</b>			
1.	KADUARA TIMUR	1	-	1	-	-	Gema Bangsa		
2.	SENDANG	1	-	1	-		Amanah		
3.	ROMBASAN	1	-	-	-	1	Cahaya Lestari	1.000.000	
4.	SENTOL LAOK	1	-	1	-	-	Makmur Sentol		
5.	LARANGAN PERRENG	1	-	1	-	-	Mitra Utama		
6.	SENTOL DAYA	1	-		-	1	Permata	7.017.000	
7.	PAKAMBAN DAYA	1	-	-	-	1	Barokah	837.900	
8.	PAKAMBAN LAOK	1	-	1	-	-	Barokah		
9.	JADDUNG	1	-	-	1	-	Citra Mandiri		
10.	PRAGAAN LAOK	1		1	-	-	Taresnah		
11.	PRAGAAN DAYA	1	-	-	1	-	Prada Sejahtera		
12.	PRENDUAN	1	-	1	-		Merpati		
13.	AENG PANAS	1	-		-	1	Permata	1.000.000	
14.	KARDULUK	1	-	1	-		Karya Lestari		
<b>12.</b>	<b>AMBUNTEN</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>5</b>			
1.	AMBUNTEN BARAT	1	-	1	-	-	Dhemar Odhi'		



No.	Kecamatan / Desa	Hasil MONITORING					Nama BUMDes	PADes	Ket.
		Terbentuk	Belum terbentuk	Aktif	Tidak aktif	Sehat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	AMBUNTEN TENGAH	1	-	1	-		Candra Kirana		
3.	AMBUNTEN TIMUR	1	-	1	-	-	Bahtera Berkah Sejahtera		
4.	TAMBAAGUNG BARAT	1	-	1	-	-	Bunga Desa		
5.	TAMBAAGUNG TENGAH	1	-	-	-	1	Mahkota	4.000.000	
6.	TAMBAAGUNG ARES	1	-	1	-	-	Sumber Payung		
7.	SOGIAN	1	-	1	-	-	Sofwan		
8.	TAMBAAGUNG TIMUR	1	-	1	-	-	Junjung Derajat		
9.	BUKABU	1	-	1	-		Natha Praja		
10.	CAMPOR BARAT	1	-	1	-	-	Al Barokah		
11.	KELES	1	-	1	-	-	Serdadu		
12.	CAMPOR TIMUR	1	-	-	-	1	Melati Indah	1.506.000	
13.	BELLUK ARES	1	-	-	-	1	Sakinah	3.458.556	
14.	BELLUK KENEK	1	-		-	1	Sejahtera	5.200.000	
15.	BELLUK RAJA	1	-	-	-	1	Rizquna	1.300.000	
<b>13.</b>	<b>PASONGSONGAN</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>2</b>			
1.	MONTORNA	1	-	1	-	-	SATUPADU		
2.	PRANCAK	1	-	1	-		PRANCAK MAKMUR		
3.	CAMPAKA	1	-	-	-	1	Bunga Desa	3.000.000	
4.	RAJUN	1	-	1	-	-	Bunga Dahlia		
5.	LEBENG TIMUR	1	-		-	1	Wahana Sejahtera	2.500.000	
6.	LEBENG BARAT	1	-	1	-	-	Konrokon		
7.	SODDARA	1	-	1	-	-	Sataretan		
8.	PASONGSONGAN	1	-	1	-	-	Jaya Samudra		
9.	PADANGDANGAN	1	-	1	-	-	Super Mantap		
10.	PANAONGAN	1	-	1	-		Benteng Jaya		
<b>14.</b>	<b>DASUK</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4</b>			
1.	SLOPENG	1	-	1	-	-	Lebah Madu		
2.	SEMAAN	1	-	-		1	Maju jaya	2.000.000	
3.	BATUBELLAH BARAT	1	-	-	1	-	Garuda Emas		
4.	BATUBELLAH TIMUR	1	-	-	-	1	Mogo Joyo	2.000.000	
5.	KECER	1	-	-	1	-			
6.	BATES	1	-	-	1	-			

No.	Kecamatan / Desa	Hasil MONITORING					Nama BUMDes	PADes	Ket.
		Terbentuk	Belum terbentuk	Aktif	Tidak aktif	Sehat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	BRINGIN	1	-	-	1	-			
8.	JELBUDAN	1	-	1	-	-			
9.	KERTA BARAT	1	-	1	-	-			
10.	KERTA TIMUR	1	-	-	1	-	Kerta Jaya		
11.	NYAPAR	1	-	-	-	1	Nyapar Jaya	3.000.000	
12.	DASUK BARAT	1	-	-	1	-	Sumber Rejeki		
13.	DASUK TIMUR	1	-	-	1	-	Al fara		
14.	DASUK LAOK	1	-	-	-	1	Mandiri Sejahtera	2.000.000	
15.	MANTAJUN	1	-	-	1	-			
<b>15.</b>	<b>RUBARU</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			
1.	MANDALA	1	-	-	-	1	Sejahtera Abadi	3.016.000	
2.	PAKONDANG	1	-	-	-	1	Pojur Jaya	6.000.000	
3.	MATANAIR	1	-	1	-	-			
4.	TAMBAKSARI	1	-	1	-	-			
5.	BANASARE	1	-	1	-	-	Potre koneng		
6.	BUNBARAT	1	-	1	-	-	Serbaguna		
7.	KARANG NANGKA	1	-	1	-	-	Bunga Seroja		
8.	BASOKA	1	-	-	-	1	Jaya Abadi	4.672.500	
9.	DUKO	1	-	-	1	-	Bukit Tanjung		
10.	RUBARU	1	-	1	-	-	Harapan Baru		
11.	KALEBENGAN	1	-	1	-	-			
<b>16.</b>	<b>BATANG-BATANG</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>			
1.	KOLPO	1	-	-	1	-			
2.	TAMIDUNG	1	-	-	-	1		3.000.000	
3.	BATANG-BATANG LAOK	1	-	-	-	1		2.000.000	
4.	BATANG-BATANG DAYA	1	-	-	-	1	Amanah	10.000.000	
5.	TOTOSAN	1	-	-	-	1	Harapan Bersama	5.172.000	
6.	BANUAJU BARAT	1	-	1	-	-	Banyu Urip		
7.	BANUAJU TIMUR	1	-	1	-	-	Kartika Jaya		
8.	JENANGGER	1	-	-	1	-			
9.	NYABAKAN TIMUR	1	-	-	1	-	Sumber Rejeki		
10.	NYABAKAN BARAT	1	-	-	-	1	Sumber Rejeki	1.000.000	

No.	Kecamatan / Desa	Hasil MONITORING					Nama BUMDes	PADes	Ket.
		Terbentuk	Belum terbentuk	Aktif	Tidak aktif	Sehat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	JANGKONG	1	-	1	-	-	Margiyu		
12.	LEGUNG BARAT	1	-	1	-	-	Sirotul Husna		
13.	LEGUNG TIMUR	1	-	-	1	-			
14.	DAPENDA	1	-	-	-	1	Cemara Udang	1.000.000	
15.	BILANGAN	1	-	-	1	-			
16.	LOMBANG	1	-	-	-	1		1.106.250	
<b>17.</b>	<b>BATUPUTIH</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>2</b>			
1.	AENGMEERAH	1	-	1	-	-	Amer Jaya		
2.	TENGEDAN	1	-	-	1	-			
3.	JURUAN LAOK	1	-	-	-	1	Jupiter	3.600.000	
4.	JURUAN DAYA	1	-	-	-	1	Teratai	3.950.000	
5.	BADUR	1	-	1	-	-	Cahaya Baru		
6.	GEDANG-GEDANG	1	-	-	1	-			
7.	BATUPUTIH KENEK	1	-	-	1	-	Antos		
8.	BATUPUTIH LAOK	1	-	-	1	-	Berkah		
9.	BATUPUTIH DAYA	1	-	-	1	-	Baday Jaya		
10.	BANTELAN	1	-	1	-	-			
11.	LARANGAN BARMA	1	-	-	1	-	Barma Agung		
12.	LARANGAN KERTA	1	-	-	1	-	Suka Maju		
13.	BULLA'AN	1	-	1	-	-	Mahkota Jaya		
14.	SERGANG	1	-	-	1	-			
<b>18.</b>	<b>DUNGKEK</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>1</b>			
1.	CANDI	1	-	-	1	-	Candi Putra	-	
2.	JADUNG	1	-	-	1	-	Al Hikmah	-	
3.	ROMBEN BARAT	1	-	1	-	-	Gajah Mada	-	
4.	ROMBEN RANA	1	-	1	-	-		-	
5.	ROMBEN GUNA	1	-	-	1	-	Barokah	-	
6.	TAMAN SARE	1	-	-	1	-	Mekar Sari	-	
7.	BICABBI	1	-	1	-	-	Pangestoh	-	
8.	DUNGKEK	1	-	1	-	-	Anugerah	-	
9.	BUNPENANG	1	-	-	-	1	Pinang Mas	5.200.000	
10.	BUNGIN-BUNGIN	1	-	1	-	-	Cahaya Cetir	-	

No.	Kecamatan / Desa	Hasil MONITORING					Nama BUMDes	PADes	Ket.
		Terbentuk	Belum terbentuk	Aktif	Tidak aktif	Sehat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	LAPA TAMAN	1	-	1	-	-	Joko Thole	-	
12.	LAPA LAOK	1	-	-	1	-	Mahkota Nusantara	-	
13.	LAPA DAYA	1	-	1	-	-	Barokah Jaya	-	
14.	BANCAMARA	1	-	-	1	-			
15.	BANRA'AS	1	-	1	-	-	Bersatu	-	
<b>19.</b>	<b>GAPURA</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>10</b>			
1.	GRUJUGAN	1	-	-	-	1		8.000.000	
2.	LONGOS	1	-	-	-	1		3.000.000	
3.	ANDULANG	1	-	-	-	1	Bunga Agung	1.200.000	
4.	GAPURA TIMUR	1	-	-	-	1	Yali	17.000.000	
5.	MANDALA	1	-	1	-	-		-	
6.	GERSIK PUTIH	1	-	-	-	1	Dinda	15.000.000	
7.	GAPURA TENGAH	1	-	-	-	1	Putri Klentang	3.409.000	
8.	GAPURA BARAT	1	-	-	1	-		-	
9.	PANAGAN	1	-	1	-	-		-	
10.	PALO'LO'AN	1	-	-	1	-	Macan Alam	-	
11.	BANJAR TIMUR	1	-	1	-	-	Duta Warga	-	
12.	BANJAR BARAT	1	-	-	1	-		-	
13.	BATUDINDING	1	-	-	-	1	Barokah Jaya	1.800.000	
14.	BABAN	1	-	-	-	1		3.000.000	
15.	KARANGBUDI	1	-	-	-	1	Serba Guna	1.600.000	
16.	BRAJI	1	-	-	1	-		-	
17.	POJA	1	-	-	-	1	Nur Hikmah	7.900.000	
<b>20.</b>	<b>GAYAM</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>			
1.	PANCOR	1	-	-	1	-	Sukses Jaya Pancor Sejahtera		
2.	PRAMBANAN	1	-	-	1	-	Sumber Makmur	-	
3.	GENDANG TIMUR	1	-	-	1	-	Bunga Teratai	-	
4.	KARANG TENGAH	1	-	-	1	-	Karang Taruna	-	
5.	JAMBUIR	1	-	-	1	-	Gajah Mada	-	
6.	GAYAM	1	-	1	-	-	Seruni	-	
7.	KALOWANG	1	-	-	1	-	Mentari	-	

No.	Kecamatan / Desa	Hasil MONITORING					Nama BUMDes	PADes	Ket.
		Terbentuk	Belum terbentuk	Aktif	Tidak aktif	Sehat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	NYAMPLONG	1	-	-	1	-	Mawar nyamplong sejahtera	-	
9.	GENDANG BARAT	1	-	-	1	-	Harapan jaya maju	-	
10.	TAREBUNG	1	-	-	1	-		-	
<b>21.</b>	<b>NONGGUNONG</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>			
1.	NONGGUNONG	1	-	-	-	1	Pasti Jaya	3.450.000	
2.	SOMBER	1	-	-	-	1	Sumber Rejeki	2.280.000	
3.	TANAH MERAH	1	-	-	-	1	Abadi	4.800.000	
4.	SOKARAMME TIMUR	1	-	-	-	1	Bunga Melati	3.900.000	
5.	SOKARAMME PASESER	1	-	-	-	1	Sumber Jaya	4.000.000	
6.	TALAGA	1	-	-	-	1	Telaga Bening	1.500.000	
7.	ROSONG	1	-	-	-	1	Maju Makmur	3.500.000	
8.	SONOK	1	-	-	-	1	Tiga saudara	3.500.000	
<b>22.</b>	<b>RA'AS</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.	KETUPAT	1	-	1	-		Ketupat Mandiri		
2.	JUNGKAT	1	-	1	-		Bumi Pertiwi		
3.	KROPOH	1	-	1	-		Karya Utama		
4.	KARANGNANGKA	1	-	1	-		Raesa Jaya		
5.	ALAS MALANG	1	-	1	-		Sumber Rejeki		
6.	POTERAN	1	-	1	-		Potra Koneng		
7.	BRAKAS	1	-	1	-		Brakas Jaya		
8.	TONDUK	1		1	-		Cindai		
9.	GUWA-GUWA	1	-	1	-		Karaeng Mandiri		
<b>23.</b>	<b>MASALEMBU</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>			
1.	SUKAJERUK	1	-	1	-				
2.	MASALIMA	1	-	1	-				
3.	MASAKAMBING	1	-	1	-				
4.	KRAMIAN	1	-	-	1	-			
<b>24.</b>	<b>ARJASA</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>0</b>			
1.	PAJANANGGER	1	-	-	1	-	Nyogo Tole		
2.	SAWAH SUMUR	1	-	-	1	-	Sawah Sumur Bangkit	-	

No.	Kecamatan / Desa	Hasil MONITORING					Nama BUMDes	PADes	Ket.
		Terbentuk	Belum terbentuk	Aktif	Tidak aktif	Sehat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	PASERAMAN	1	-	-	1	-	Bangkit Maju Bersama Paseraman Sejahtera		
4.	GELAMAN	1	-	1	-	-	Gelaman Jaya		
5.	BUDDI	-	1	-	-	-			
6.	KOLO-KOLO	1	-	1	-	-	Surya Samudra		
7.	ANGKATAN	1	-	-	1	-	Lanon Maritim		
8.	KALISANGKA	1	-	-	1	-		-	
9.	BILIS-BILIS	1	-	-	1	-	Lombi Teler		
10.	LAOK JANG-JANG	1	-	-	1	-	Rumah Bunda		
11.	SUMBERNANGKA	1	-	1	-		Gummang Jaya		
12.	DUKO	1	-	-	1	-	Delia Utama Duko Abadi		
13.	KALIKATAK	1	-	-	1	-	Tunas Kelapa		
14.	ARJASA	1	-	-	1	-			
15.	KALINGANYAR	1	-	-	1	-	Tunas Muda Jaya		
16.	ANGON-ANGON	1	-	-	1	-	Karya Pemuda		
17.	SAMBAKATI	1	-	-	1	-	Samba Lestari		
18.	PANDEMAN	1	-	-	1	-	Pandeman Sejahtera		
19.	PABEAN	1	-	-	1	-	Rumput Hijau		
<b>25.</b>	<b>SAPEKEN</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			
1.	SEPANJANG	1	-	-	-	1	PANJI SURI	15.200.000	
2.	TANJUNG KIAOK	1	-	1	-		CAHAYA TANJUNG		
3.	SAKALA	1	-	1	-		BATU MA'DENKENG		
4.	PAGERUNGAN BESAR	1	-	-	-	1	PAGERUNGAN JAYA	25.000.000	
5.	PAGERUNGAN KECIL	1	-	1	-	-	PADDALLEANTE		
6.	SASEEL	1	-	1	-		SASE'EL JAYA		
7.	SEPEKEN	1	-	1	-	-	MANDIR		
8.	SABUNTEN	1	-	1	-		JAYA		
9.	PALIAT	1	-	1	-		TIRTA MANDIRI		
10.	SADULANG	1	-	-	1	-	PERSADA		
11.	SAUR SAEBUS	1	-	-	1	-	SEJAHTERA		
<b>26.</b>	<b>BATUAN</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			
1.	PATEAN	1	-	-	-	1	BERKARYA	2.000.000	

No.	Kecamatan / Desa	Hasil MONITORING					Nama BUMDes	PADes	Ket.
		Terbentuk	Belum terbentuk	Aktif	Tidak aktif	Sehat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	BABBALAN	1	-	1	-	-	MAJU SEJAHTERA	-	
3	GEDUNGAN	1	-	-	1	-	SUMBER MAKMUR	-	
4.	GUNGGUNG	1	-	-	-	1	PUTRA AGUNG	30.000.000	
5.	BATUAN	1	-	1	-	-	BATU PERMATA	-	
6.	TORBANG	1	-	1	-	-	Sa Ate	-	
7.	GELUGUR	1	-	-	-	1	ANUGERA DESA	1.785.000	
<b>27.</b>	<b>KANGAYAN</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			
1.	SAOBI	1	-	1	-	-	Samudra Jaya		
2.	KANGAYAN	1	-	1	-	-	Asda		
3.	TORJEK	1	-	-	-	1	Jaya Mandiri	950.000	
4.	CANGKRAMAAN	1	-	-	-	1	Sejahtera	750.000	
5.	TEMBAYANGAN	1	-	1	-	-	Matahari Terbit		
6.	BATUPUTIH	1	-	1	-	-			
7.	DAANDUNG	1	-	-	-	1	Mutiara Bakti	2.150.000	
8.	TIMUR JANG-JANG	1	-	-	1	-	Lautan asmara		
9.	JUKONG-JUKONG	-	1	-	-	-			
<b>330 Desa</b>		<b>328</b>	<b>2</b>	<b>138</b>	<b>100</b>	<b>90</b>			

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

**2) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel dengan Indikator Persentase Desa yang melaksanakan Tata Kelola dengan baik.**

Proses pengukuran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel dengan cara mengidentifikasi pengumpulan dokumen secara tepat waktu, antara lain: RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes, dan Laporan Realisasi DD dan ADD, Imput Profil Desa/Kelurahan pada Aplikasi Prodeskel Kementerian dalam Negeri

dan Imput Data Desa pada Aplikasi DIGDAYA Data Integrasi Desa Berdaya).

Pada tahun 2023 target capaian Persentase Desa yang melaksanakan Tata Kelola dengan baik sebesar 100% (330 Desa) dengan realisasi sebesar 100% (330 Desa) sehingga capaian yang dihasilkan adalah sebesar 100% atau termasuk kategori sangat tinggi. Hal ini dapat terlihat dari pengumpulan dokumen dan data secara tepat waktu, yang terdiri dari: RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDDes, dan Laporan Realisasi DD dan ADD, Imput Profil Desa/Kelurahan pada Aplikasi Prodeskel Kementerian dalam Negeri serta Imput Data pada Aplikasi DIGDAYA (Data Integrasi Desa Berdaya) yang merupakan Sistem Informasi Desa yang berbentuk Website Desa.

### 3) **Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2023 tanggal 06 September 2023 Nomor : x.700/1969/435.060.2/2023 oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep sebagaimana tabel 3.4.berikut :

**Tabel 3.4**

#### **Hasil Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat Sumenep**

No	Komponen	Bobot	Score Nilai
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	30,00%	24,41%
2	Pengukuran Kinerja	30,00%	25,54%
3	Pelaporan Kinerja	15,00%	12,19%
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intern	25,00%	19,31%
Jumlah		100,00%	81,45%



Uraian Hasil Evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kinerja Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja yang meliputi keselarasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dengan kinerja yang ingin dicapai. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar 24,41 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00.
- b. Pengukuran Kinerja Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja, serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil Evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar 25,54 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00.
- c. Pelaporan Kinerja Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar 12,19 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00.
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Evaluasi atas pelaksanaan evaluasi kinerja oleh internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep mencakup penilaian atas pemenuhan evaluasi kinerja internal, kualitas pelaksanaan, dan pemanfaatan atas evaluasi kinerja internal tersebut, serta pemenuhan atas rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP tahun 2022. Hasil Evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar 19,31 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 25,00.

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja yang didapat adalah sebesar 81,45%.

Pada tahun 2023 target capaian Persentase Capaian kinerja perangkat daerah sebesar 100% dengan realisasi sebesar 81,45% sehingga capaian yang dihasilkan adalah sebesar 81,45% atau termasuk kategori tinggi

**b) Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya**

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023**  
**dengan Capaian Kinerja Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Desa yang Mandiri dan Produktif	Persentase BUMDES / BUMDESMA yang memberikan kontribusi pada PADes	4,24%	33,04%	779,25%	4,85 %	25,64%	528,68%
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Persentase Desa yang melaksanakan Tata Kelola dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	80,65%	80,65%	100%	81,45%	81,45%

## **Sasaran Strategis**

### **1) Mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Desa yang Mandiri dan Produktif dengan indikator Persentase BUMDES /BUMDESMA yang memberikan kontribusi pada PADes.**

Berdasarkan tabel diatas, Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Desa yang Mandiri dan Produktif dengan indikator Persentase BUMDES /BUMDESMA yang memberikan kontribusi pada PADes, bahwa pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 7,40 % atau 54 BUMDes yang sudah tidak memberikan kontribusi pada PADes. Capaian perbandingan capaian kinerja Persentase BUMDES /BUMDESMA yang memberikan kontribusi pada PADes didapat dari rumus Jumlah BUMDes ditambah Jumlah BUMDesMa yang memberikan Kontribusi PADes dibagi Jumlah BUMDes ditambah Jumlah BUMDes Ma terbentuk di kalikan 100%,

### **2) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel dengan Indikator Persentase Desa yang melaksanakan Tata Kelola dengan baik.**

Capaian Kinerja sasaran pada perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022 dengan Persentase Desa yang melaksanakan Tata Kelola dengan baik tidak melami perubahan, dari target yang akan dicapai terpenuhi sebesar 100% (330 Desa) dikarenakan Desa di Kabupaten Sumenep sudah melaksanakan apa yang menjadi target dari Renstra dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep yaitu Desa melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan dengan baik dengan cara melalui mengidentifikasi pengumpulan dokumen secara tepat waktu, antara lain: RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes, dan Laporan Realisasi DD dan ADD, Imput Profil Desa/Kelurahan pada Aplikasi Prodeskel Kementrian dalam Negeri dan Imput Data Desa pada

Aplikasi DIGDAYA (Data Integrasi Desa Berdaya) dan itu sama dengan dilakukan pada tahun sebelumnya. Walaupun secara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tingkat capaiannya mengalami perubahan.

Pada tahun 2023 target capaian Persentase Desa yang melaksanakan Tata Kelola dengan baik sebesar 100% (330 Desa) dengan realisasi sebesar 100% (330 Desa) sehingga capaian yang dihasilkan adalah sebesar 100%, Hal ini dapat terlihat dari pengumpulan dokumen dan data secara tepat waktu, yang terdiri dari: RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes, dan Laporan Realisasi DD dan ADD, Imput Profil Desa/Kelurahan pada Aplikasi Prodeskel Kementerian dalam Negeri serta Imput Data pada Aplikasi DIGDAYA (Data Integrasi Desa Berdaya) yang merupakan Sistem Informasi Desa yang berbentuk Website Desa

**3) Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**

Berdasarkan tabel diatas, Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah, bahwa pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 mengalami Kenaikan sebesar 0,80 %.

**c) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah (RENSTRA)**

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Desa yang Mandiri dan Produktif	Persentase BUMDES /BUMDESMA yang memberikan kontribusi pada PADes	25,64%	30,91%	82,95%
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Persentase Desa yang melaksanakan Tata Kelola dengan baik	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	81,45%	100%	81,45%

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran Tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 pada RPJMD periode 2021-2026 telah memperoleh hasil yang memuaskan, hal ini terlihat bahwa 3 (tiga) indikator kinerja telah berhasil mencapai target indikator kinerja Tahun 2023, keberhasilan ini karena adanya dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai pengungkit tercapainya tujuan dan sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**d) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional/Prov.**

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa berkembang yang menjadi desa maju	54 Desa	23.035 Desa	0,234%
2	Mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Desa yang Mandiri dan Produktif	Persentase BUMDES /BUMDESM A yang memberikan kontribusi pada PADes	25,64%	-	-
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Persentase Desa yang melaksanakan Tata Kelola dengan baik	100%	-	-

Dari hasil rekapitulasi data Indeks Desa Membangun yang dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) Republik Indonesia, diketahui bahwa rata-rata angka Indeks Desa Membangun secara Nasional adalah 0,6934 (Berkembang), rata-rata angka IDM Provinsi Jawa Timur adalah 0,7807 (Maju). Sedangkan jumlah desa Mandiri di Indonesia ada 11.456 Desa Mandiri. Angka tersebut sudah jauh melampaui target RPJMN 2024 yaitu 5.000 desa berstatus mandiri.

Berdasarkan Kepmendagri 050-145/2022 jumlah desa di Indonesia sebanyak 75.261. Sedangkan Jumlah desa di Jawa Timur ada 7.721. Desa dengan Desa Mandiri sebanyak 2.800 Desa Mandiri, 3.674 Desa Maju, 1.247 Desa Berkembang. Untuk Kabupaten Sumenep Desa Mandiri sebanyak 39 Desa Mandiri, 147 Desa Maju, 144 Desa Berkembang.

Sehingga capaian kinerja sasaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yaitu dengan indikator Jumlah

desa berkembang yang menjadi desa maju capaian kinerjanya sebesar 0,234% jika apabila dibandingkan dengan Nasional.

Berikut disampaikan Tabel Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten Sumenep

**Tabel 3.8**  
**Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten Sumenep**  
**Tahun 2023**

No	Tingkatan	Rata- Rata Angka Indeks Desa Membangun	Jumlah Desa berdasarkan Kepmen dagri 050-145/2022	Desa Mandiri		Desa Maju		Desa Berkembang	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nasional	0,6934 (Berkembang)	75.265	11.456	15,22	23.035	30,61	28.766	38,22
2	Jawa Timur	0,7807 (Maju)	7.721	2.800	36,26	3.674	47,58	1.247	16,15
3	Kabupaten Sumenep	0.7263 (Maju)	330	39	11,82	147	44,55	144	43,64

**e) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.9**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

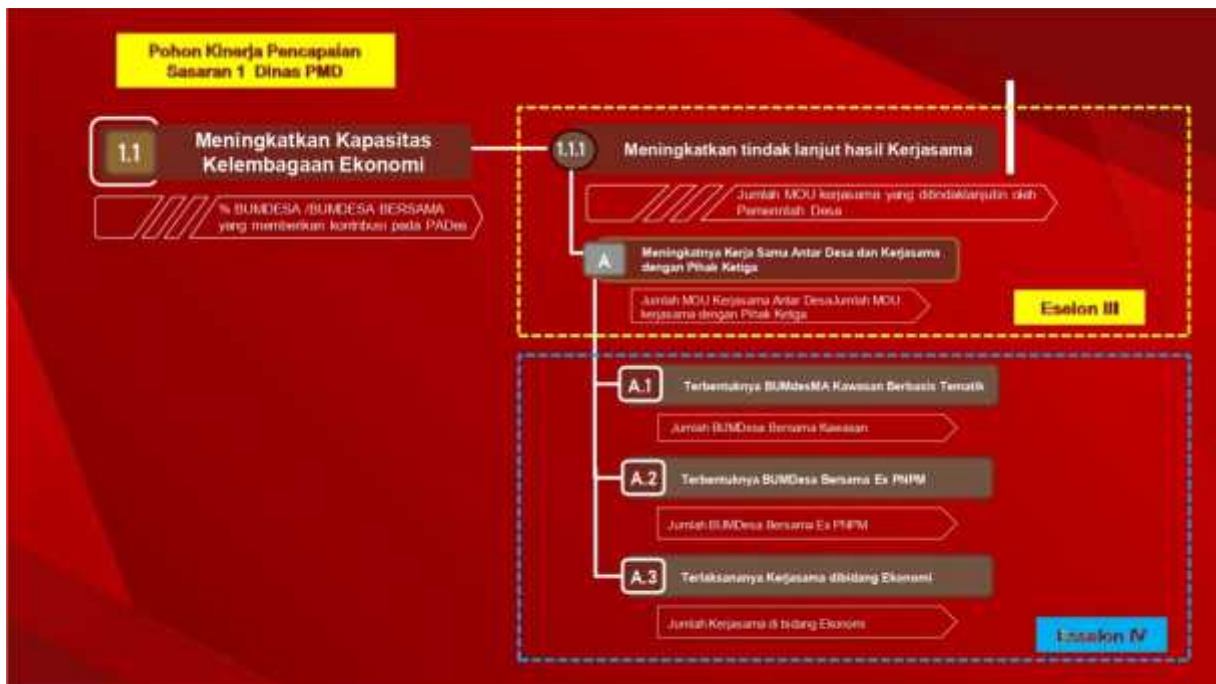
No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Desa yang Mandiri dan Produktif	Persentase BUMDES /BUMDE SMA yang memberikan kontribusi pada PADes	4,85 %	25,64%	528,68%	Adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa	Memperkuat SDM dalam Pengelolaan BUMDes dan Bumdes Ma melalui Pembinaan dan fasilitasi dalam peningkatan BUMDes/BU MDes Ma
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Persentase Desa yang melaksanakan Tata Kelola dengan baik	100%	100%	100%	Adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa	Pembinaan dan Fasilitasi Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	81,45%	81,45%	Adanya komitmen dari Level Pimpinan hingga Pelaksana	Pembinaan dan arahan Pimpinan / Atasan terhadap Semua Pegawai dilingkungan DPMD

Dalam menunjang arah kebijakan dan strategi pencapaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep, maka untuk Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep menyempurnakan Pohon Kinerja tahun sebelumnya yang nantinya akan dijadikan acuan ukuran kinerja oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep dalam mencapai Indikator Kinerja Utama, rencana kerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas. Pohon Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

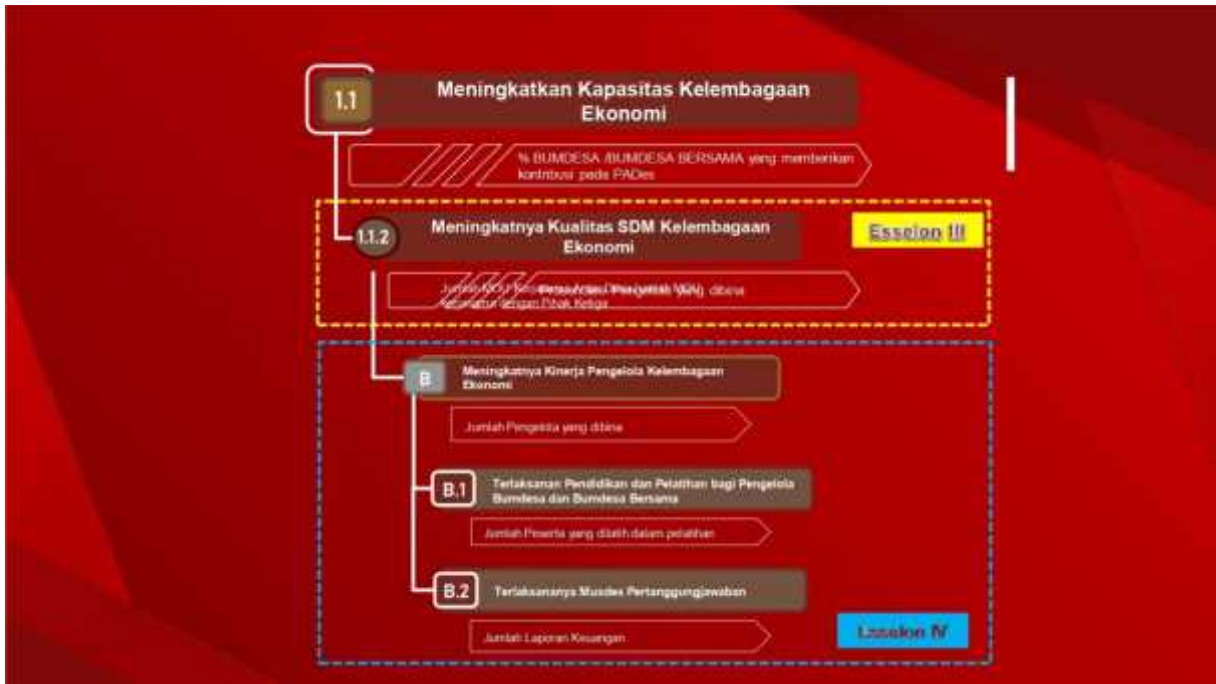




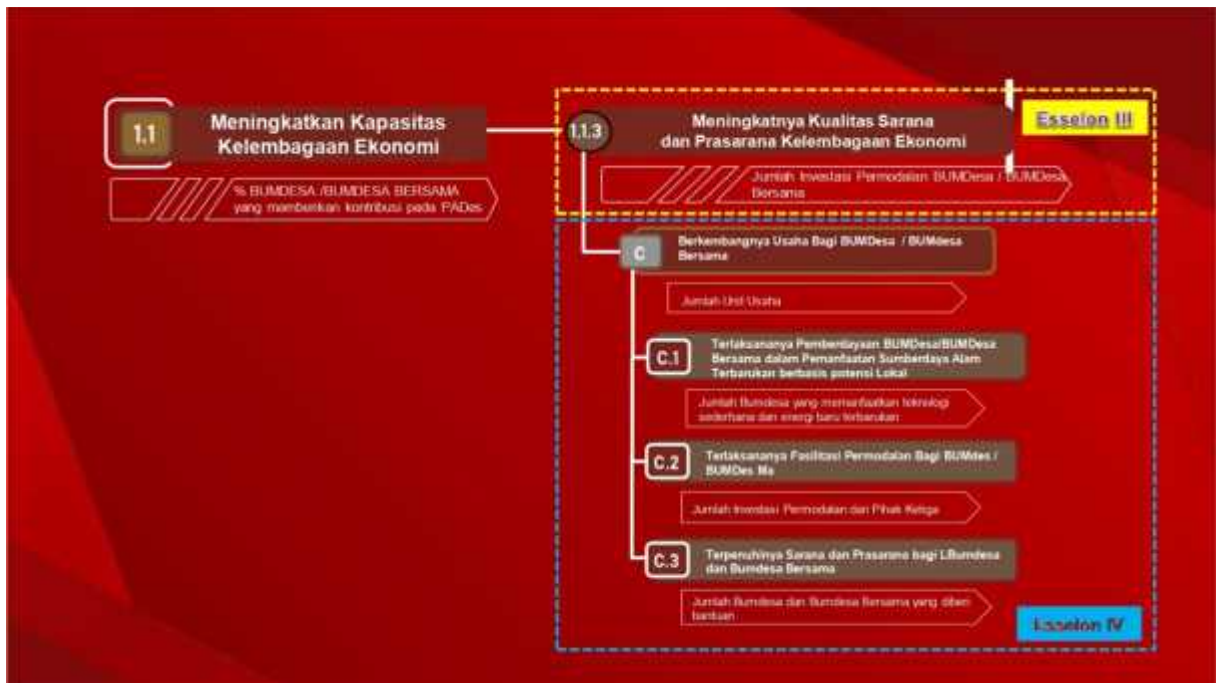
Gambar 1. Pohon Kinerja Pencapaian Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



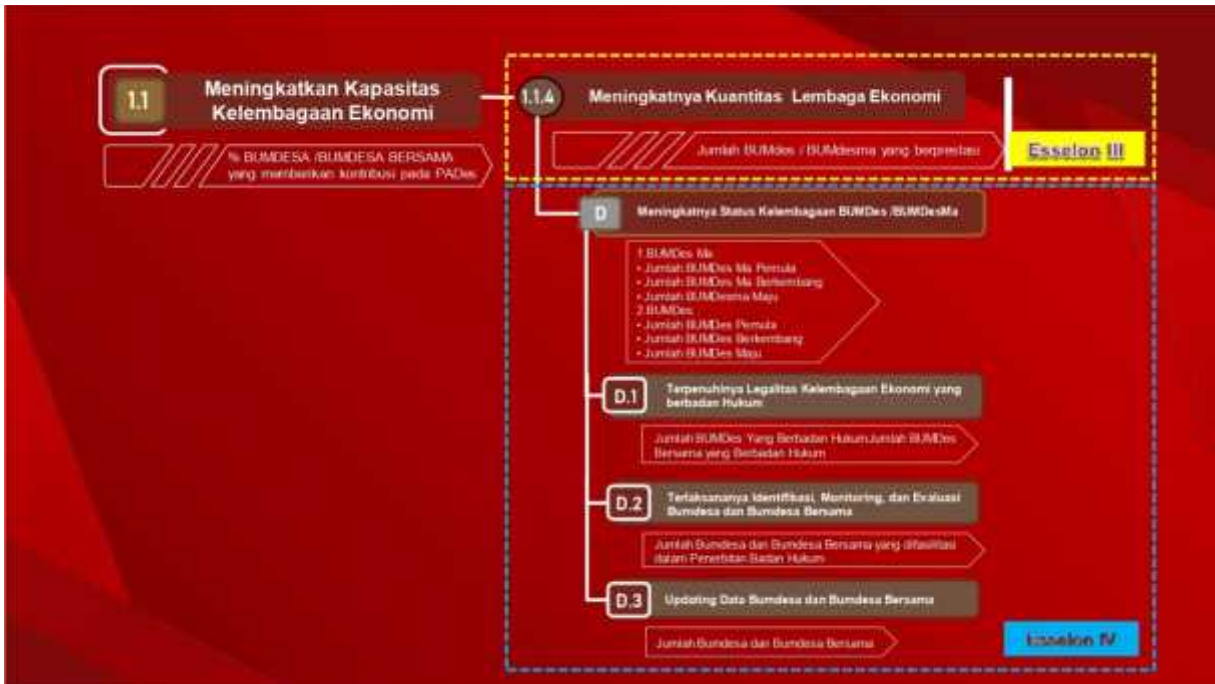
Gambar 2. Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Gambar 3. Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



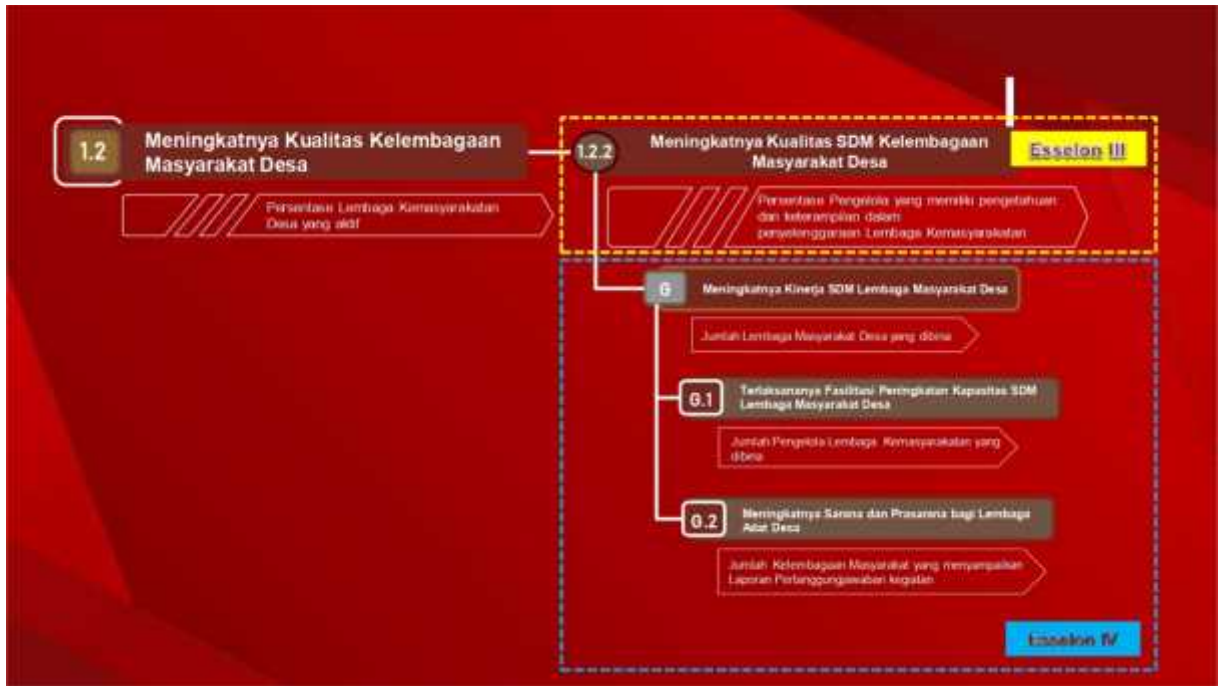
Gambar 4. Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



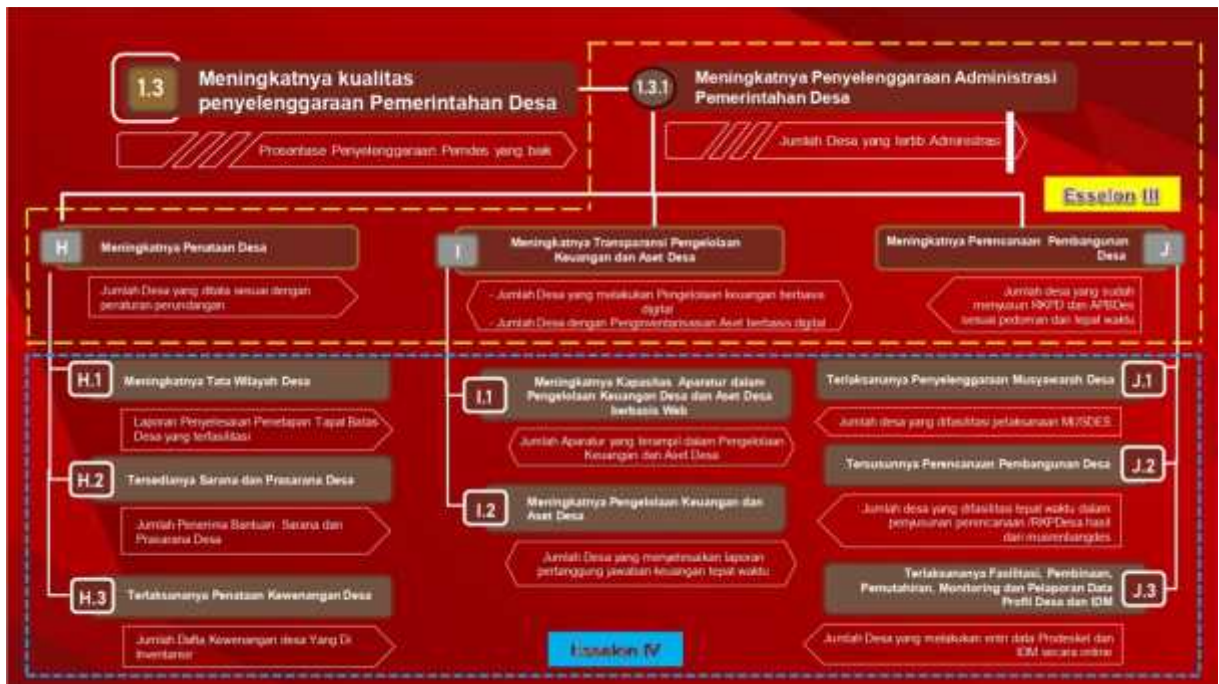
Gambar 5. Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Gambar 6. Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Gambar 7. Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Gambar 8. Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Gambar 8. Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep, maka dirumuskan sejumlah program, kegiatan dan Sub Kegiatan teknis yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Tingkat Keberhasilan
1	2		3	4	5	6
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota Daerah	terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah	100	93,97	93,97	Sangat Tinggi
	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100	100	100	Sangat Tinggi
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian laporan kinerja OPD tepat waktu	100	100	100	Sangat Tinggi
	3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan yang dipenuhi	0,25	0,25	100	Sangat Tinggi

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Tingkat Keberhasilan
1	2		3	4	5	6
	4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan yang dipenuhi	100	76,67	76,67	Tinggi
	5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Jenis Barang yang disediakan	6	6	100	Sangat Tinggi
	6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa layanan yang dipenuhi	100	75	75	Sedang
	7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100	97,88	97,88	Sangat Tinggi
<b>II.</b>	<b>Program Penataan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang difasilitasi dalam penataan Desa</b>	<b>12,77</b>	<b>11,39</b>	<b>89,19</b>	<b>Tinggi</b>
	1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penataan Desa	295	247	83,73	Tinggi
<b>III.</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>	<b>% Desa yang menyelenggarakan Kerjasama Desa</b>	<b>33,33</b>	<b>27,4</b>	<b>82,21</b>	<b>Tinggi</b>
		<b>Persentase Bumdes Maju</b>	<b>6,36</b>	<b>10,61</b>	<b>166,82</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
	1. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Jumlah BUMDes Bersa ma yang terbentuk	28	23	82,14	Tinggi
		Jmlah BUMDes berkem bang menjadi maju	21	35	166,67	Sangat Tinggi
<b>IV.</b>	<b>Program Administrasi Pemerintah Desa</b>	<b>Persentase Desa yang melaksanakan administrasi tertib</b>	<b>50,87</b>	<b>59,82</b>	<b>117,59</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
	1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yg dilakukan Pembinaan & Pengawasan dlm Penyelenggaraan Adm Desa	330	330	100,00	Sangat Tinggi
<b>V.</b>	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>Persentase Lembaga Adat Desa yang terbentuk</b>	<b>5,39</b>	<b>5,39</b>	<b>100,00</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
		<b>Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif</b>	<b>61,53</b>	<b>56,66</b>	<b>92,09</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
	1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LAD terbentuk berdasarkan Per UU	18	18	100,00	Sangat Tinggi
		Jumlah LKD yg terben tuk berdasarkan Per UU	5373	5918	110,14	Sangat Tinggi
<b>Nilai Rata-Rata</b>			<b>202</b>	<b>198</b>	<b>97,83</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan diatas merupakan Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah Daerah.

Berdasarkan pernyataan kinerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep telah berkomitmen untuk melaksanakan 5 Program 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan yang akan mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu :

➤ **Sasaran Mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Desa yang Mandiri dan Produktif**

Pencapaian sasaran dengan indikator Persentase BUMDES /BUMDESMA yang memberikan kontribusi pada PADes didukung melalui Program Peningkatan Kerja Sama Desa dengan indikator :

1) Persentase BUMDes Maju

Pada indikator ini capaian kinerjanya sebesar 166,76%, capaian kinerja tersebut dihitung berdasarkan rumus Jumlah BUMDes Maju dibagi dengan Jumlah Desa dikalikan seratus persen. Pada tahun 2023 target terhadap BUMDes Maju sebesar 6,36% atau 21 BUMDes, sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar 10,61 % atau 35 BUMDes, sehingga capaian kinerjanya sebesar 166,76%.

2) Persentase Desa yang melakukan Kerjasama.

Pada indikator ini, capaian kinerjanya sebesar 82,21 %, capaian kinerja tersebut di hitung berdasarkan rumus Jumlah Desa yang melakukan kerjasama desa dibagi jumlah desa dikalikan 100%, Pada tahun 2023 target yang ingin dicapai adalah sebesar 33,33% atau 110 Desa, sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar 27,4%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 82,21%

Program Peningkatan Kerjasama desa didukung dengan kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan indikator Jumlah BUMDes berkembang menjadi Maju dan Jumlah BUMDes Ma yang terbentuk.

Untuk capaian kinerja dari indikator Jumlah Desa Berkembang menjadi Maju sebesar 166,67%, Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 21 BUMDes yang maju, dengan realisasi sebesar 35 BUMDes yang maju, sehingga capaian kinerjanya sebesar 166,67%, sedangkan untuk capaian Jumlah BUMDesMa yang terbentuk pada tahun 2023

ditargetkan sebesar 28 Bumdes Ma, dengan realisasi sebesar 23 BUMDes Ma, sehingga capaian kinerjanya sebesar 82,14%.

Tercapainya Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa secara operasional didukung oleh sub kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten /Kota dengan indikator Jumlah dokumen kerjasam antar Desa dalam Kabupaten/Kota dengan pencapaian kinerjanya sebesar 100% (3 dokumen), serta didukung pula oleh sub kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan perdesaan dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kerjasama Desa yang pencapaian kinerjanya sebesar 100% (2 dokumen).

➤ **Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.**

Pencapaian kinerja dari indikator Persentase Desa yang melaksanakan Tata Kelola dengan baik didukung oleh :

- 1) Program Penataan Desa dengan indikator Persentase Desa yang difasilitasi dalam penataan Desa dengan indikator Persentase Desa yang difasilitasi dalam Penataan Desa.

Pada tahun 2023 indikator ini ditargetkan sebesar 12,77%, dengan realisasi sebesar 11,39%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 89,19%. Pada Program ini didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa dengan indikator Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penataan Desa.

Untuk kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa secara operasional didukung oleh Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa, Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa dan Sub kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa. Akan tetapi pada Tahun 2023 kegiatan ini hanya didukung oleh sub kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa dengan indikator Jumlah Sarana dan Prasaran desa yang terfasilitasi. Jumlah Desa yang difasilitasi sarana dan Prasarana ditargetkan sebanyak 40 Desa dengan Realisasi sebesar 42 Desa, sehingga capaian kinerjanya sebesar 105%. Sub kegiatan Fasilitasi Saran dan Prasarana desa difokuskan pada Pembangunan



dan Rehab Kantor/Balai Desa atau sarana dan prasarana Pemerintah Desa.

- 2) Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase Desa yang melaksanakan tertib administrasi  
Pada tahun 2023 Indikator Prosentase Desa yang melaksanakan tertib administrasi ditargetkan sebesar 50,87 % dengan realisasi sebesar 59,82% sehingga capaian kinerjanya sebesar 117,59 %.  
Program Administrasi Pemerintahan Desa didukung oleh Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Administrasi Desa. Untuk tahun 2023 indikator tersebut ditargetkan sebesar 330 Desa dengan realisasi sebesar 330 Desa sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

Sejalan dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, DPMD Kabupaten Sumenep melaksanakan kegiatan penyelenggaraan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah desa dan bendahara desa guna peningkatan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia khususnya di pemerintahan desa se Kabupaten Sumenep.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep pada tahun 2023 menyelenggarakan bimbingan teknis /pelatihan serta pendampingan/fasilitasi dengan sasaran aparatur pemerintah desa yang meliputi: Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, Kaur, Kasi dan Bendahara Desa.

Dalam rangka mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep berupaya mencapai tujuan dan sasaran melalui:

- Pembinaan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Pembinaan aparatur dan kelembagaan pemerintah desa;

Pemerintahan desa yang berkinerja baik adalah pemerintahan desa yang melaksanakan kewenangan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat, melalui tahapan pembangunan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan pengawasan, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Secara operasional Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa didukung oleh Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dengan indikator Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun, Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa dengan indikator Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa

- 3) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dengan indikator Persentase Lembaga Adat Desa yang terbentuk dan Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif

Secara operasional pencapaian progra ini juga diwujudkan melalui pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan didukung Sub Kegiatan

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Fasilitasi Tim Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa. Keberhasilan pencapaian sasaran Program ini diperoleh dari indikator kinerja Program persentase Lembaga Adat yang terbentuk dan aktif terealisasi 5,39 % dari target kinerja sebesar 5,39 %. Sehingga tingkat pencapaian kerjanya dengan pencapaian sebesar 100%.

Lembaga Kemasyarakatan yang menjadi binaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah 10.441 LKM D/K yang terdiri dari Karang Taruna 331 Lembaga, Posyandu 1367 Lembaga, Lembaga pemberdayaan Masyarakat 331 Lembaga, TP-PKK 362 Lembaga, RW. 2017 dan RT 6037. Dari 10.441 LKM D/K yang ada, aktif 7260 lembaga yang terdiri dari TP-PKK 362 lembaga, Posyandu 1.363 Lembaga, Karang Taruna 165 Lembaga, Rukun Warga 1.345 Lembaga dan Rukun Tetangga 4.025 Lembaga.

Tingkat keaktifan tersebut dibuktikan dengan adanya susunan pengurus, terdapat kegiatan yang didukung anggaran baik dari APBD maupun APBDesa serta siap melayani masyarakat.

Dalam rangka memperkuat kesadaran bersama terhadap pergeseran arah kebijakan pembangunan pada era Otonomi Daerah yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan semangat kebersamaan, ketekunan, keuletan dan kesabaran yang kuat. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan serta kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) merupakan keterpaduan antara TNI bersama pemerintah daerah sebagai upaya percepatan terobosan pembangunan di

daerah pedesaan serta sebagai langkah peningkatan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Realisasi Anggaran**

Untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup serta memadai diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus didukung dengan dana yang memadai baik jumlah maupun kelancaran pencairannya. Salah satu tuntutan masyarakat terkait dengan pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*) adalah terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep. Berdasarkan prinsip akuntabilitas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, dalam bentuk akuntabilitas keuangan (*financial accountability*) berupa Laporan Keuangan (yang terdiri dari Neraca, Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran/ LRA, Catatan Atas Laporan Keuangan/ CaLK) dan akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Dengan mekanisme pertanggungjawaban tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang ditetapkan, tetapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, terkait dengan capaian keberhasilan kinerja.

Pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep mendapatkan pagu anggaran untuk sebesar Rp. 18.511.233.538,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.923.162.692,00 atau terealisasi sebesar 86,02%. Dari total pagu anggaran yang telah diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep pada Tahun Anggaran 2023, maka anggaran tersebut dialokasikan untuk pendanaan pada 5 (Lima) program yang terbagi dalam 4 (empat) bidang dan sekretariat.

Dalam laporan ini hanya dibahas tentang penggunaan Belanja dari anggaran PAPBD II baik yang digunakan untuk belanja pembangunan maupun belanja rutin dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.11**  
**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
I.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>6.498.898.884,00</b>	<b>5.213.942.224,92</b>	<b>80,23%</b>
	<b>1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>2.985.300,00</b>	<b>86,53%</b>
	1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.450.000,00	2.985.300,00	86,53%
	<b>2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.411.309.171,00</b>	<b>4.217.244.147,00</b>	<b>77,93%</b>
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.408.609.171,00	4.214.796.747,00	77,93%
	2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.700.000,00	2.447.400,00	90,64%
	<b>3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>36.973.000,00</b>	<b>33.973.000,00</b>	<b>91,89%</b>
	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26.973.000,00	26.973.000,00	100,00%
	2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	7.000.000,00	70,00%
	<b>4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>434.012.060,00</b>	<b>400.815.794,00</b>	<b>92,35%</b>
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.980.000,00	3.954.000,00	99,35%
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.643.460,00	128.533.945,00	96,90%

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
	3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	181.088.600,00	163.916.100,00	90,52%
	4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	10.650.000,00	96,82%
	5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.864.000,00	3.310.000,00	48,22%
	6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.436.000,00	90.451.749,00	91,89%
	<b>5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>64.130.500,00</b>	<b>62.450.000,00</b>	<b>97,38%</b>
	1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.130.500,00	62.450.000,00	97,38%
	<b>6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>145.298.000,00</b>	<b>130.893.451,00</b>	<b>90,09%</b>
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	145.298.000,00	130.893.451,00	90,09%
	<b>7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>403.726.153,00</b>	<b>365.580.532,00</b>	<b>90,55%</b>
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138.239.608,00	119.022.251,00	86,10%
	2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.140.000,00	34.311.875,00	94,94%
	3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	229.346.545,00	212.246.406,92	92,54%
<b>II.</b>	<b>Program Penataan Desa</b>	<b>15.001.000,00</b>	<b>14.697.000,00</b>	<b>97,97%</b>
	<b>1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>15.001.000,00</b>	<b>14.697.000,00</b>	<b>97,97%</b>

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
	1. Sub Kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	15.001.000,00	14.697.000,00	97,97%
<b>III.</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>	<b>726.945.900,00</b>	<b>404.141.087,00</b>	<b>55,59%</b>
	<b>1. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Antar Desa</b>	<b>726.945.900,00</b>	<b>404.141.087,00</b>	<b>55,59%</b>
	1. Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	72.001.100,00	69.685.000,00	96,78%
	2. Sub Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	654.944.800,00	334.456.087,00	51,07%
<b>IV.</b>	<b>Program Administrasi Pemerintah Desa</b>	<b>7.833.542.060,00</b>	<b>7.083.627.778,00</b>	<b>90,43%</b>
	<b>1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>7.833.542.060,00</b>	<b>7.083.627.778,00</b>	<b>90,43%</b>
	1. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2.547.500.000,00	2.462.350.000,00	96,66%
	2. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	176.456.100,00	174.317.700,00	98,79%
	3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	99.127.000,00	97.518.100,00	98,38%
	4. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa	68.512.000,00	65.742.100,00	95,96%
	5. Sub Kegiatan Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	4.901.946.960,00	4.246.021.878,00	86,62%
	6. Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	40.000.000,00	37.678.000,00	94,20%

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
V.	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>3.436.845.694,00</b>	<b>3.206.754.604,00</b>	<b>93,31%</b>
1.	<b>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.436.845.694,00</b>	<b>3.206.754.604,00</b>	<b>93,31%</b>
1.	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.792.317.620,00	1.696.624.385,00	94,66%
2.	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1.644.528.074,00	1.510.130.219,00	91,83%
	<b>Jumlah</b>	<b>18.511.233.538,00</b>	<b>15.923.162.692,00</b>	<b>86,02%</b>

### C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.12**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Desa yang Mandiri dan Produktif	4,85	25,64	528,66	726.945.900,00	404.141.087,00	55,59	10,52



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	100,00	100,00	100,00	11.285.388.754,00	10.305.079.382,00	91,31	91,31
3.	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100,00	81,45	81,45	6.498.898.884,00	5.213.942.224,92	80,23	98,50
<b>Jumlah</b>		<b>204,85</b>	<b>207,09</b>	<b>101,09</b>	<b>18.511.233.538,00</b>	<b>15.923.162.693,92</b>	<b>86,02</b>	<b>85,09</b>

Dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian Sasaran Strategis yang didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep, rata-rata realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan dengan realisasi kinerja dengan nilai sebesar 85,09% yang secara rerata telah mencapai target yang telah ditentukan. Hal tersebut menunjukkan efisiensi dalam pencapaian sasaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.13**

**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100	93,97	93,97	6.498.898.884	5.213.942.223	80,23	85,38
	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	3.450.000	2.985.300	86,53	86,53
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	5.411.309.171	4.217.244.147	77,93	77,93

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,25	0,25	100	36.973.000	33.973.000	91,89	91,89
	4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	76,67	76,67	434.012.060	400.815.794	92,35	120,45
	5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	6	100	64.130.500	62.450.000	97,38	97,38
	6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	75	75	145.298.000	130.893.451	90,09	120,11
	7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	97,88	97,88	403.726.153	365.580.532	90,55	92,51
<b>II.</b>	<b>Program Penataan Desa</b>	<b>12,77</b>	<b>11,39</b>	<b>89,19</b>	<b>15.001.000</b>	<b>14.697.000</b>	<b>97,97</b>	<b>109,84</b>
	1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	33,33	27,4	82,21	15.001.000	14.697.000	97,97	119,18
<b>III.</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>166,67</b>	<b>726.945.900</b>	<b>404.141.087</b>	<b>97,97</b>	<b>78,75</b>
		<b>28</b>	<b>23</b>	<b>82,14</b>				
	1. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	12,77	11,39	89,19	726.945.900	404.141.087	82,21	160,01
		295	40	13,56				
<b>IV.</b>	<b>Program Administrasi Pemerintah Desa</b>	<b>50,87</b>	<b>59,82</b>	<b>117,59</b>	<b>7.833.542.060</b>	<b>7.083.627.778</b>	<b>90,43</b>	<b>76,90</b>
	1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	330	330	100,00	7.833.542.060	7.083.627.778	90,43	9,57
<b>V.</b>	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>5,39</b>	<b>5,39</b>	<b>100,00</b>	<b>3.436.845.694</b>	<b>3.206.754.604</b>	<b>97,97</b>	<b>102,01</b>
		<b>61,53</b>	<b>56,66</b>	<b>92,09</b>				
	1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	18	18	100,00	3.436.845.694	3.206.754.604	82,21	78,24
		5373	5918	110,14				

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota							
	<b>Nilai Rata-Rata</b>	<b>190</b>	<b>206</b>	<b>108,18</b>	<b>18.511.233.538</b>	<b>15.923.162.692</b>	<b>86,02</b>	<b>79,52</b>

Dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten sumenep, rata-rata realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan dengan realisasi kinerja yang secara rerata telah mencapai target yang telah ditentukan. Realisasi anggaran Tahun 2023 untuk belanja dari alokasi anggaran sebesar Rp. 18.511.233.538,00 telah terealisasi 86,02 % atau sebesar Rp. 15.923.162.692,00. Apabila dibandingkan rata-rata realisasi kinerja per Program dan Kegiatan yang mencapai 108,18%, maka hal tersebut menunjukkan efisiensi sebesar 79,52 %, hal tersebut didukung oleh manajemen pengendalian internal maupun eksternal Perangkat Daerah yang memadai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2023 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran Mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Desa yang Mandiri dan Produktif terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase BUMDES /BUMDESMA yang memberikan kontribusi pada PADes dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 528,68% (kategori sangat tinggi)
- Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Desa yang melaksanakan Tata Kelola dengan baik dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat tinggi)

- Sasaran Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 81,45% (Kategori Tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 18.511.233.538,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai 15.923.162.692,00, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 86,02 % dan nilai efisiensi anggaran sebesar 20,74 %.

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain adalah :

1. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat berkenaan dengan regulasi-regulasi pusat yang terdapat perbedaan-perbedaan dalam penetapan maupun dalam pengaturannya.
2. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan seluruh OPD, untuk memaksimalkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan otonomi daerah, maupun dalam akselerasi implementasi regulasi dan ketentuan pusat sesuai dengan kondisi, karakteristik, potensi dan permasalahan daerah.
3. Meningkatkan kualitas SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan, pembinaan yang berkelanjutan, serta pemberian kesempatan pendidikan, guna meningkatkan kualitas pengetahuan dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugasnya.

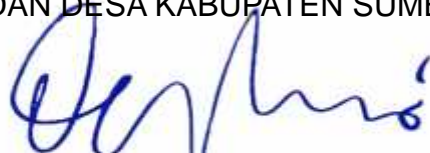
Pentingnya Komitmen dan dukungan semua pihak untuk pengembangan program pemberdayaan masyarakat, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menjadi bagian penting dalam rangka mewujudkan keterpaduan program mengingat

capaian kinerja yang sangat baik tentunya tidak terlepas dari dukungan perencanaan kinerja dan penganggaran yang sesuai dan akuntabel.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sumenep.

Sumenep,

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN SUMENEP



**ANWAR SYAHRONI YUSUF, AP., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19741215 199311 1 001